

EVALUASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DI KABUPATEN BOJONEGORO

Ananda Cahya Regita¹, Dida Rahmadanik, S.AP., M.AP², Dra. Indah Murti, M.Si³

¹²³ Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember, 2025

Revised Desember, 2025

Accepted Desember, 2025

Available Desember, 2025

Anandaregita364@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Mengevaluasi kebijakan penyelenggaraan kepemudaan dalam rangka pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap perangkat daerah terkait, organisasi kepemudaan, serta para pemuda pelaku wirausaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan pada aspek fasilitasi, pelatihan, dan pembinaan, namun efektivitasnya masih belum optimal karena keterbatasan koordinasi antarinstansi, kurangnya kesinambungan program, serta minimnya dukungan sarana dan anggaran. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan, penguatan perencanaan program berbasis kebutuhan pemuda, serta pengembangan ekosistem kewirausahaan pemuda yang bertujuan Perda No. 1 Tahun 2019 dapat tercapai secara maksimal.

Kata Kunci: Kewirausahaan; Kepemudaaan; Pengembangan

ABSTRACT

Evaluating the youth implementation policy in the context of developing entrepreneurship in Bojonegoro Regency based on Regional Regulation Number 1 of 2019 concerning Youth Implementation was carried out using a qualitative descriptive approach through data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation studies of related regional apparatus, youth organizations, and young entrepreneurs. The results of the study indicate that the implementation of the policy has been running in the aspects of facilitation, training, and coaching, but its effectiveness is still not optimal due to limited coordination between agencies, lack of program continuity, and minimal support for facilities and budget. This study recommends increasing synergy between stakeholders, strengthening program planning based on youth needs, and developing a more comprehensive youth entrepreneurship ecosystem so that the objectives of Regional Regulation No. 1 of 2019 can be achieved optimally

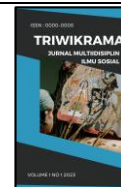
Keywords: Entrepreneurship; Youth; Development

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, dan sebagian besar penduduknya berada pada usia produktif. Potensi ini tentu menjadi kekuatan besar apabila dapat dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, khususnya dalam bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

*Corresponding author

E-mail addresses: Anandaregita364@gmail.com



Di antara kelompok usia produktif tersebut, pemuda menjadi bagian yang sangat strategis karena memiliki energi, ide-ide segar, dan semangat perubahan. Namun, banyak pemuda Indonesia belum mendapatkan kesempatan yang optimal untuk berkembang secara ekonomi (Ilmu Ekonomi FE-UII Pengembangan Wirausaha Muda Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015).

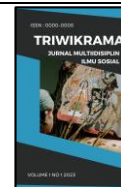
Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro disebabkan oleh kondisi geografis, sarana dan prasarana, jumlah penduduk, rendahnya pendidikan dan rendahnya kualitas kesehatan. Kabupaten Bojonegoro memiliki wilayah hutan yang sangat luas 42% dari luas keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bojonegoro. Masyarakat yang tinggal berdekatan dengan hutan di Bojonegoro tergolong dalam masyarakat miskin, lantaran penduduk sekitar hutan berprofesi sebagai petani, di tambah ketidak pemilikan atas lahan dan keterbatasan sarana dan prasana penunjang hasil pertanian menambah buruk kondisi perekonomian (Diyah & Adawiyah, 2020).

Kondisi sarana dan prasarana sektor pertanian menjadi suatu yang penting untuk di tuntasakan mengingat masyarakat Bojonegoro mayoritas sebagai profesi petani khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan Bojonegoro yang memiliki luas hampir separuh dari luas keseluruhan luas Kabupaten Bojonegoro. Jumlah penduduk juga menjadi tolok ukur untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu wilayah, dilihat dari pendapatan dan jumlah keluarga di dalamnya, serta melihat jumlah sumber daya manusia dalam usia produktif dan usia tidak produktif. Jika dalam dalam usia produktif banyak sumber daya manusia yang menganggur dapat di pastikan kesejahteraan di suatu wilayah pasti rendah. Tingkat pembangunan juga dapat menjadi tolok ukur kesejahteraan wilayah, pembangunan yang baik menandakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik pula (Basia Prodi Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana et al., 2016).

Dalam konteks daerah, Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dari sektor pertanian, industri kreatif, dan sumber daya alam. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan usaha berbasis lokal oleh pemuda. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menggagas berbagai program kepemudaan dan kewirausahaan. Namun demikian, sejauh mana program-program ini efektif dalam mendorong partisipasi pemuda masih perlu dikaji secara mendalam (Kurniawan, n.d.).

Potensi demografi ini merupakan peluang strategis bagi pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan pemuda, khususnya di bidang kewirausahaan. Namun kenyataannya, angka pengangguran dan kemiskinan di kalangan pemuda masih cukup signifikan. Sebagian besar pemuda Bojonegoro masih bergantung pada sektor informal, seperti buruh tani dan pekerja lepas. Hanya sebagian kecil yang terjun ke dunia usaha mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa kewirausahaan belum menjadi pilihan utama dalam mencari penghidupan (Puspitasari et al., 2015).

Rendahnya minat pemuda terhadap kewirausahaan tidak lepas dari keterbatasan akses terhadap pelatihan, modal usaha, jaringan bisnis, dan dukungan kebijakan yang konsisten. Banyak pemuda yang memiliki ide bisnis, namun tidak tahu bagaimana memulainya. Selain itu, tantangan struktural seperti terbatasnya lapangan kerja dan ketimpangan ekonomi antara desa dan kota di Bojonegoro turut memperkuat fenomena urbanisasi. Banyak pemuda memilih merantau ke kota besar seperti Surabaya, Malang, atau bahkan ke luar Jawa. Jika dikelola dengan baik, potensi lokal Bojonegoro seperti hasil pertanian, batik khas Jonegoroan, serta kerajinan kayu dan rotan,



dapat menjadi basis pengembangan wirausaha lokal yang berdaya saing (*Pengembangan_Kewirausahaan_Berbasis_Pote*, n.d.).

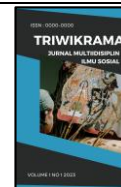
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mencanangkan sejumlah program pemberdayaan pemuda melalui pelatihan wirausaha, pendampingan UMKM, dan fasilitasi bantuan modal. Namun, belum ada kajian mendalam mengenai efektivitas dari program-program tersebut. Evaluasi terhadap kebijakan daerah menjadi penting untuk mengetahui apakah program yang dilaksanakan telah tepat sasaran, efisien dalam penggunaan anggaran, dan berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan pemuda. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk membangun ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan. Kebijakan kepemudaan seharusnya tidak hanya berorientasi pada output seperti jumlah peserta pelatihan, tetapi juga pada outcome dan impact seperti jumlah usaha baru yang bertahan dan berkembang (URGensi PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN UNTUK MENANGGULANGI PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA, n.d.).

Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor migas (minyak dan gas bumi). Namun, ironisnya, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara merata. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya. Ketimpangan pembangunan dan keterbatasan akses ekonomi, terutama di kalangan pemuda dan masyarakat pedesaan, menjadi salah satu faktor penyumbang tingginya angka kemiskinan tersebut (Pusat et al., 2019).

Dalam menghadapi permasalahan kemiskinan, pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya mengandalkan sektor formal, tetapi juga mendorong tumbuhnya sektor informal dan ekonomi kreatif, salah satunya melalui pengembangan kewirausahaan. Kewirausahaan diyakini sebagai salah satu solusi strategis untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi ketergantungan terhadap lapangan kerja konvensional yang semakin terbatas. Pemuda sebagai kelompok usia produktif memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak dalam kegiatan wirausaha yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman (Puspitasari et al., 2015).

Kabupaten Bojonegoro menunjukkan komposisi penduduk yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per tahun 2024, sekitar 63,62% dari total penduduk—atau sekitar 868,48 ribu jiwa—berada dalam kelompok umur 15-59 tahun. Jika diasumsikan sebagian besar dari kelompok ini merupakan pemuda yang baru memasuki usia kerja atau berada pada awal fase angkatan kerja (usia 15-30 tahun), maka jumlah pemuda potensial untuk didorong dalam kewirausahaan cukup signifikan.

Data rinci dari Sensus Penduduk 2022 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk di rentang usia 15-19 tahun adalah 87.710 jiwa, sedangkan untuk 20-24 tahun mencapai 92.048 jiwa, dan 25-29 tahun sekitar 97.037 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa total pemuda usia kerja (15-29 tahun) dapat ditaksir mencapai sekitar 276.795 jiwa, jumlah yang sangat potensial jika difasilitasi dengan kebijakan kewirausahaan yang tepat.



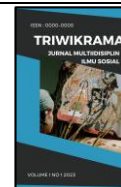
Angka ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi sumber daya manusia muda yang besar dan siap kerja, namun tanpa intervensi yang tepat, jumlah pemuda ini juga berisiko menjadi beban sosial. Bahkan laporan sebelumnya menyebutkan bahwa pada tahun 2019 jumlah penduduk usia kerja di Bojonegoro telah mencapai 990 ribu orang, dengan peningkatan angkatan kerja baru hingga 61.365 orang selama 2017-2020. Jika jumlah tersebut tidak diimbangi dengan kebijakan yang efektif dalam pengembangan kewirausahaan atau penciptaan lapangan kerja, maka akan berpotensi menimbulkan penumpukan pengangguran—yang, menurut data pada Agustus 2020, mencapai angka 37 ribu. Oleh karena itu, pengembangan kewirausahaan pemuda bukan hanya sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk memanfaatkan potensi demografi ini secara maksimal (109-352-1-PB, n.d.).

Kabupaten Bojonegoro telah secara konsisten menyelenggarakan berbagai program pemberdayaan pemuda sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Pada tahun 2023, sebuah Sarasehan Kepemudaan diadakan untuk merumuskan strategi pemberdayaan pemuda, dan berhasil melibatkan sekitar 150 peserta dari berbagai organisasi kepemudaan dan komunitas lokal. Kemudian, pada 2024 dihelat program Collab Ranger sebagai bentuk kolaborasi membentuk Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN), yang berhasil menjaring 713 peserta, terdiri dari siswa, guru BK, dan pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan. Selanjutnya, pada Agustus 2024, Young Entrepreneurs Expo dan Forum Pemuda Pelopor digelar dengan menghadirkan puluhan wirausaha muda dan pelaku ekonomi kreatif di 39 booth, sebagai wahana pengembangan ide dan kreativitas pemuda di bidang kewirausahaan (ppid.bojonegorokab.go.id).

Pemberdayaan kepemudaan merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas generasi muda agar mampu bersaing di dunia kerja. Pada dasarnya, pemuda merupakan kelompok usia yang memiliki potensi besar dalam mempengaruhi kemajuan dan pembangunan suatu daerah, termasuk Kabupaten Bojonegoro. Namun, meskipun jumlah pemuda cukup besar, seringkali mereka menghadapi tantangan dalam memasuki dunia kerja. Beberapa faktor yang menjadi penghambat antara lain kurangnya keterampilan yang relevan, rendahnya pendidikan dan pelatihan, serta ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, pemberdayaan pemuda di Kabupaten Bojonegoro menjadi sangat penting untuk menciptakan tenaga kerja yang siap pakai, memiliki keterampilan yang memadai, dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dunia kerja yang dinamis.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu “Pengembangan Badan Usaha Milik Desa melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” oleh Azhari;Moh. Mustofa;Erika Dwi Meisari;Erika Tri Setia Anggarista (2023), yakni sama-sama menyoroti peran pembangunan kapasitas khususnya sumber daya manusia sebagai kunci dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Keduanya mendasari solusi pengembangan usaha (BUMDes dalam penelitian terdahulu dan kewirausahaan pemuda dalam penelitian Anda) pada peningkatan inovasi, pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman para pelaku, sehingga kebijakan dan upaya yang difokuskan pada penguatan kompetensi lokal menjadi benang merah antar-studi(*Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*, n.d.).



Penelitian terdahulu “Gerakan Ayo Sekolah di Kabupaten Bojonegoro: Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan untuk Menyongsong Bonus Demografi” oleh Sonyaruri Satiti (2019), yaitu sama-sama menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi penting dalam merespon peluang demografis maupun ekonomi lokal. Keduanya menyoroti intervensi pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan kepemudaan dan pendidikan sebagai kunci dalam meningkatkan kapasitas masyarakat lokal: satu melalui kewirausahaan pemuda dan satu lagi melalui pengurangan putus sekolah dan perbaikan pendidikan di Bojonegoro(Satiti, 2019).

Penelitian ini memiliki kesamaan substantif dengan penelitian oleh Ahmad Sholikin, “Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Potensi Lokal di Kabupaten Bojonegoro” (2024), dalam hal sama-sama menitikberatkan pada pemanfaatan potensi lokal sebagai fondasi bagi intervensi publik. Meskipun fokusnya berbeda kewirausahaan pemuda versus pengentasan kemiskinan kedua studi ini menyiratkan bahwa penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kebijakan yang disesuaikan dengan konteks lokal merupakan strategi vital bagi pembangunan daerah yang efektif(Ahmad Sholikin, 2024).

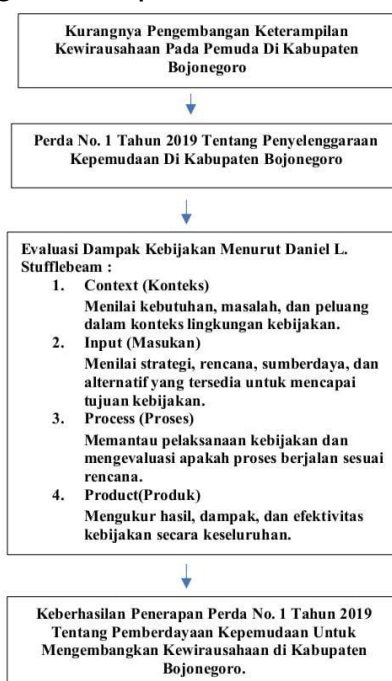
Penelitian terdahulu oleh: Elisa Nur Cahyanti & Listyaningsih tentang peran Karang Taruna di Desa Plesungan dalam mengurangi pengangguran pemuda (2015), memiliki kesamaan pada penekanan pentingnya wadah lokal (kebijakan daerah maupun organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna) untuk meningkatkan kapasitas dan memberdayakan pemuda secara langsung pada level komunitas setempat melalui praktik kewirausahaan dan manajemen usaha, sehingga mendekatkan tujuan pembangunan ekonomi dengan kebutuhan nyata masyarakat desa(Cahyanti, 2015).

Penelitian terdahulu memiliki kesamaan mendasar dengan program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal yang dilaksanakan KKN-TK Universitas Bojonegoro di Desa Betet (2024), yang difokuskan pada peningkatan potensi sektor ekonomi melalui penguatan lembaga masyarakat. Kedua studi ini sama-sama menekankan pentingnya kerangka kelembagaan lokal seperti kebijakan publik di tingkat kabupaten maupun institusi masyarakat desa sebagai pendorong utama dalam mengembangkan kapasitas ekonomi komunitas, khususnya melalui pendekatan kolaboratif yang memberdayakan aktor lokal dalam menciptakan peluang kewirausahaan dan ketahanan ekonomi desa(Anggapratama et al., 2024).

Penelitian terdahulu “Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 1982-2008” oleh Manzila Armylia & Wasino (2021), yang menyoroti intervensi pemerintah melalui pendidikan, ketahanan pangan, dan kesehatan sebagai landasan peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Keduanya berbagi key insight bahwa kebijakan publik yang dirancang untuk memperkuat kapasitas masyarakat entah melalui pendidikan dan layanan dasar, atau melalui dukungan untuk kewirausahaan pemuda dapat menjadi motor utama pembangunan lokal dan transformasi kondisi sosial-ekonomi daerah(*Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 1982-2008*, n.d.).

Penelitian oleh Asih Handayani (2018) mengenai “Pengaruh tingkat pendidikan, kesehatan dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro (2002-2015)” sama-sama menggarisbawahi pentingnya faktor-faktor manusiawi seperti pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja sebagai determinan utama dalam memperbaiki kondisi sosial-ekonomi. Dalam penelitian Handayani, terbukti bahwa pendidikan dan kesehatan berkontribusi menurunkan kemiskinan, sedangkan pengangguran malah memperparahnya. Persis seperti itu, skripsi Anda meninjaunya dari sisi kebijakan kepemudaan dan kewirausahaan, yang sesungguhnya juga berakar pada peningkatan kapasitas pemuda melalui pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi sehingga kedua penelitian berbagi visi bahwa penguatan modal manusia dan peluang kerja adalah kunci bagi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan (Tingkat Pendidikan et al., 2002).

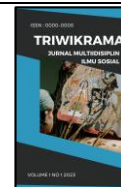
Gambar Kerangka Konseptual Model *Daniel L. Stufflebeam*



2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengevaluasi secara mendalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kepemudaan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Bojonegoro. Pendekatan ini digunakan karena sesuai dengan karakteristik permasalahan yang ingin dikaji, yaitu memahami proses kebijakan, peran para aktor, serta dampak yang ditimbulkan terhadap pengembangan wirausahawan di kalangan pemuda. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman kontekstual mengenai kebijakan dan implementasinya di lapangan.

Jenis dan Sumber Data



Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan sumber data utama yang dilengkapi dan didukung data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Secara umum, penelitian mempunyai dua jenis sumber data, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya atau sumber pertama. Data primer ini merupakan data yang dimaksudkan untuk menjawab fenomena penelitian. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait ataupun melalui pengamatan langsung dari peneliti di lapangan atau tempat penelitian dilakukan. Sumber data sekunder, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung atau bukan dari sumber pertama. Data sekunder dapat diambil dari dokumen-dokumen, buku literatur, jurnal, internet, dan lain-lain. Data ini digunakan untuk mendukung data primer dalam pelaksanaan proses analisa.

Pengumpulan Data

Secara umum, Pengumpulan data merupakan tahap pertama untuk memperoleh berbagai informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kepemudaan dan program pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Bojonegoro. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro, lembaga pelatihan kepemudaan, dan masyarakat muda pelaku usaha. Tujuannya adalah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap pengembangan kewirausahaan pemuda.

Analisi Data

Adapun prosedur penelitian Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman, yang meliputi empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Stufflebeam, 2000).

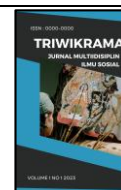
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Program Desa Devisa

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, Perda ini diterbitkan untuk memberikan arah dan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas, kemandirian, dan peran aktif pemuda, termasuk dalam aspek kewirausahaan. Kebijakan ini menjadi penting karena banyak pemuda Bojonegoro belum memiliki keterampilan dan akses yang memadai untuk memasuki dunia usaha maupun pasar kerja.

Sebelum adanya kebijakan ini, berbagai program kepemudaan di Bojonegoro dinilai tidak terkoordinasi dengan baik dan kurang menyentuh kebutuhan riil pemuda, terutama terkait kesempatan berwirausaha. Beberapa pemuda mengeluhkan minimnya pelatihan yang relevan dan tidak meratanya akses informasi tentang kegiatan pengembangan diri. *“Awalnya kebijakan ini dibuat karena kita melihat banyak anak muda yang punya minat usaha, tapi masih kurang akses pelatihan, pendampingan, dan ruang untuk berkembang. Perda ini ada supaya pembinaan pemuda bisa lebih terarah. Sampai sekarang kebijakannya masih relevan, kebutuhan wirausaha muda pun makin besar. Hanya saja, untuk berjalan lebih maksimal, kami tetap butuh dukungan, anggaran yang memadai dan dulu pelatihan itu tidak terarah, tidak semua pemuda tahu ada kegiatan. Dengan adanya Perda, program jadi lebih jelas dan ada dasar hukumnya,”* (Pejabat Dinas Perinaker Bojonegoro).



Adapun Pengelola program dan pelatihan menjelaskan bagaimana latar belakang beliau dapat menjadi pengelola program ini dan menambahkan bahwa kebijakan ini memberikan kejelasan prosedur dan membuka ruang partisipasi pemuda untuk mengembangkan kapasitas diri melalui kegiatan pelatihan, bootcamp, hingga sosialisasi bisnis. Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan dalam pendataan dan pemerataan akses. *“Awalnya saya sebenarnya tidak kepikiran terlibat langsung, tapi kebetulan saudara saya bekerja di Dinas Perinaker dan pernah cerita soal program ini. Waktu kami ngobrol santai, ternyata apa yang dibutuhkan program ini cocok dengan pengalaman dan minat saya di bidang pendampingan usaha. Dari situ saya ditawarkan untuk ikut membantu, dan setelah diskusi lebih lanjut, ya akhirnya saya masuk dan terlibat sampai sekarang. Menurut saya Perda ini bagus karena memayungi kegiatan pemuda, tapi pelaksanaannya belum semua pemuda terjangkau, terutama di desa yang jauh dari kota,”* (Pengelola program dan pelatihan).

Dari sisi pemuda sebagai sasaran program, sebagian besar peserta pelatihan menyatakan bahwa keberadaan kebijakan ini membantu mereka mendapatkan keterampilan baru dan menyiapkan diri untuk memulai usaha. Namun, beberapa pemuda lain yang belum terjangkau program menilai bahwa informasi pelatihan belum sepenuhnya merata. *“Yang ikut program jelas merasa terbantu, tapi kami yang di desa kadang tidak tahu ada pelatihan, jadi tidak bisa daftar,”* (Pemuda non-peserta).

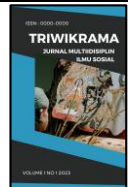
Secara umum, konteks kebijakan ini sangat relevan dengan kebutuhan pemuda Bojonegoro, terutama dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan memperluas kesempatan berwirausaha. Namun, efektivitas pelaksanaan kebijakan masih bergantung pada perbaikan sistem pendataan pemuda, pemerataan akses informasi, serta perluasan jangkauan program ke seluruh wilayah kabupaten.

perencanaan kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda disusun setiap tahun melalui koordinasi lintas bidang, mengacu pada Perda No. 1 Tahun 2019. Namun, pihak dinas mengakui bahwa pendataan pemuda yang menjadi sasaran program belum sepenuhnya optimal. Beberapa desa melaporkan belum memperbarui data pemuda potensial, sehingga daftar calon peserta pelatihan sering tidak akurat. *“Kadang ada pemuda yang sudah bekerja masih tercatat sebagai sasaran pelatihan, tapi pemuda baru yang butuh pelatihan justru belum masuk data,”* (Pejabat Dinas Perinaker).

Dari sisi sarana dan prasarana, pengelola program menjelaskan bahwa fasilitas pelatihan seperti ruang kelas, peralatan praktik, dan perangkat digital sudah tersedia meski kapasitasnya masih terbatas, terutama untuk pelatihan berbasis produksi seperti kuliner, kriya, dan desain. Beberapa desa pinggiran juga mengalami keterbatasan akses transportasi menuju lokasi pelatihan sehingga menyulitkan peserta. Selain itu, instruktur pelatihan berjumlah terbatas dan sering merangkap di beberapa program. *“Alat sudah ada, tapi untuk pelatihan tertentu pesertanya banyak, jadi harus bergantian memakai fasilitas,”* (Pengelola Program).

Dari sisi peserta, pemuda yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka sangat membutuhkan pelatihan, namun informasi mengenai pendaftaran tidak selalu merata sehingga hanya pemuda tertentu yang mengetahui peluang tersebut.

Masyarakat umum mengungkapkan bahwa dukungan terhadap pelatihan sudah cukup baik, tetapi berharap agar pemerintah memperluas cakupan peserta dan menyediakan fasilitas yang lebih memadai. Secara umum, aspek input sudah berjalan sesuai pedoman kebijakan, namun



belum optimal karena lemahnya pendataan pemuda, keterbatasan instruktur, dan sarana pelatihan yang belum merata. mekanisme penyelenggaraan program pelatihan kewirausahaan pemuda di Kabupaten Bojonegoro sudah mengikuti alur baku, mulai dari sosialisasi, seleksi peserta, pelaksanaan pelatihan, hingga monitoring pascapelatihan. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa proses implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Pengelola program menjelaskan bahwa koordinasi antara dinas, perangkat desa, dan peserta tidak selalu berjalan lancar, terutama terkait informasi jadwal pelatihan. *“Kadang jadwal berubah tapi tidak semua peserta mendapat info cepat, akhirnya ada yang datang terlambat atau tidak hadir,”* (Pengelola Program Pelatihan).

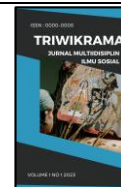
dampak dari kebijakan terhadap pemuda serta perkembangan kewirausahaan lokal. Berdasarkan wawancara dengan pejabat dinas, pelatihan kewirausahaan dinilai berhasil meningkatkan keterampilan dan motivasi pemuda dalam memulai usaha, terlihat dari meningkatnya jumlah pemuda yang membuka usaha kecil setelah mengikuti pelatihan. Pengelola program juga menyebutkan bahwa alumni Bootcamp, Workshop, dan Sosialisasi Bisnis menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam hal kemampuan produksi, manajemen keuangan, hingga pemasaran digital. *“Ada beberapa peserta yang setelah pelatihan langsung jualan online dan usahanya berkembang,”* (Pengelola Program).

Pemuda peserta program umumnya merasakan manfaat langsung, seperti meningkatnya pengetahuan tentang pemasaran, kemampuan membuat produk baru, dan kepercayaan diri untuk merintis usaha. Namun, sebagian peserta menyatakan bahwa keterbatasan modal menjadi kendala lanjutan sehingga tidak semua peserta bisa langsung membuka usaha. *“Pelatihannya membantu banget, tapi setelah itu kami butuh modal. Tidak semua bisa langsung jalan,”* (Peserta Inkubasi Bisnis).

Dari sisi masyarakat, dampak pelatihan terlihat dari bertambahnya unit usaha baru di lingkungan sekitar serta meningkatnya aktivitas ekonomi lokal, terutama di tingkat desa. Mereka menilai bahwa program ini membantu mengurangi pengangguran pemuda dan memberikan efek sosial positif. Namun, masyarakat juga menyoroti bahwa tidak semua peserta dapat mempertahankan usahanya karena kurangnya pendampingan jangka panjang. Secara keseluruhan, output kebijakan menunjukkan kecenderungan positif, tetapi keberlanjutan hasil masih perlu diperkuat melalui dukungan lanjutan dan pemantauan berkala.

Dari sisi pendampingan, pejabat dinas menyebutkan bahwa pendampingan usaha setelah pelatihan memang dirancang dalam program, tetapi belum bisa dilakukan secara rutin karena keterbatasan tenaga pendamping dan banyaknya jumlah peserta. Di sisi lain, pemuda peserta mengaku bahwa proses pelatihan cukup interaktif dan memberikan banyak kesempatan praktik, namun durasi pelatihan dinilai terlalu singkat untuk materi tertentu, terutama terkait pengembangan produk dan pemasaran digital. *“Pelatihannya bagus, tapi waktunya sedikit. Belum sempat praktek banyak, sudah pindah materi lain,”* (Peserta Pelatihan).

Masukan dari masyarakat menunjukkan bahwa beberapa hasil pelatihan belum sepenuhnya terimplementasi karena peserta membutuhkan bimbingan lanjutan. Mereka juga menilai bahwa pelatihan sudah berjalan baik, tetapi keterlibatan pemuda desa terpencil masih



rendah karena kendala akses dan informasi. Secara menyeluruh, proses implementasi cukup kondusif, tetapi belum maksimal karena kendala komunikasi, aksesibilitas, dan lemahnya pendampingan pascapelatihan.

Selain itu, terdapat pula kegiatan Workshop Wirausaha Muda, yang diikuti oleh 89 orang pemuda. Program ini lebih menekankan pada peningkatan wawasan, manajemen dasar usaha, serta pemanfaatan teknologi dalam pengembangan bisnis modern. Sebagai pendukung ekosistem wirausaha lokal, pemerintah juga menyelenggarakan Inkubasi Bisnis UMKM/BUM Desa dengan jumlah peserta yang jauh lebih besar, yaitu 375 orang. Inkubasi ini merupakan bentuk penguatan kapasitas usaha agar lebih siap memasuki pasar, meningkatkan kualitas produksi, dan memperluas jejaring bisnis.

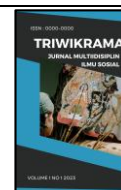
Perkembangan UMKM di Bojonegoro menunjukkan hal yang positif, yang dapat dijadikan indikator bahwa kebijakan dan pelatihan kewirausahaan memberikan dampak yang cukup berarti. Data menunjukkan bahwa jumlah UMKM meningkat dari 78.012 unit (2020) menjadi 80.637 unit (2021), kemudian naik menjadi 86.820 unit (2022), 91.390 unit (2023), dan 91.728 unit pada 2024. Dari total UMKM tahun 2024, terdapat 81.562 unit usaha mikro, 9.181 usaha kecil, dan 985 usaha menengah, menunjukkan bahwa sektor usaha mikro mendominasi aktivitas ekonomi masyarakat Bojonegoro.

Aktor Dalam Program Kebijakan

Evaluasi kebijakan penyelenggaraan kepemudaan di Kabupaten Bojonegoro tidak dapat dilepaskan dari peran strategis pejabat Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro. Para pejabat ini bertindak sebagai perumus teknis, pelaksana, sekaligus pengawas jalannya program kewirausahaan bagi pemuda. Mereka berperan memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan amanat Perda No. 1 Tahun 2019 mengenai pengembangan kapasitas, kemandirian, dan kreativitas pemuda. Selain itu, pejabat dinas juga menjadi pihak yang menyediakan anggaran, menyusun kurikulum pelatihan, serta menjalin koordinasi lintas lembaga agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Aktor lain yang berperan penting adalah pengelola program atau pelaksana pelatihan kewirausahaan, yang biasanya terdiri dari instruktur, pendamping UMKM, atau lembaga pelatihan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Mereka memainkan peran teknis langsung dalam proses pemberdayaan pemuda, mulai dari penyampaian materi, pendampingan praktik wirausaha, hingga evaluasi hasil pelatihan. Kualitas kompetensi para pengelola program sangat menentukan keberhasilan transfer keterampilan kepada peserta. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas pelatihan sangat dipengaruhi oleh kemampuan instruktur dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan pemuda di Bojonegoro, serta sejauh mana pengelola mampu memberikan pendampingan lanjutan setelah pelatihan berlangsung.

Sementara itu, pemuda sebagai sasaran program merupakan aktor utama yang menentukan keberlanjutan kebijakan. Tingkat partisipasi, motivasi, serta kemampuan mereka mengaplikasikan materi pelatihan menjadi indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan program kewirausahaan. Banyak di antara pemuda Bojonegoro yang mengikuti pelatihan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman usaha yang beragam, sehingga respons mereka terhadap program pun berbeda. Apabila para pemuda mampu mengembangkan usaha baru atau memperluas usaha yang sudah ada, maka kebijakan ini dapat dikatakan berjalan efektif. Selain itu, masyarakat sekitar juga termasuk aktor yang terdampak, baik secara langsung maupun tidak



langsung. Kehadiran usaha-usaha baru yang dijalankan pemuda berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, membuka peluang kerja, dan memperkuat jaringan sosial di tingkat desa maupun kecamatan. Dampak sosial dan ekonomi masyarakat ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai sejauh mana kebijakan penyelenggaraan kepemudaan benar-benar membawa perubahan positif.

No.	Aktor	Lembaga	Peran
1.	Pemerintah	Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro	Mengevaluasi dan mengkaji kebijakan serta program
2.	Eksternal	Pengelola Program/ Pelatihan	Mengimplementasikan program serta monitoring
3.	Sasaran	Pemuda	Berpartisipasi dalam program
4.	Masyarakat	Masyarakat Sekitar	Mendukung berjalanya program

Sumber : peneliti

PEMBAHASAN

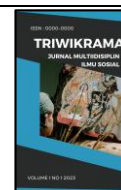
Analisis dalam pembahasan ini menggunakan model evaluasi kebijakan CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan Daniel Stufflebeam.

A. Komponen Context (Konteks)

Context dalam model evaluasi CIPP digunakan untuk memahami sejauh mana kebijakan penyelenggaraan kepemudaan dalam rangka pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Bojonegoro memiliki dasar yang jelas, serta kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini, landasan hukum yang digunakan, seperti Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan, serta kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kepemudaan yang menjadi latar belakang lahirnya kebijakan. Evaluasi terhadap konteks diperlukan untuk mengidentifikasi masalah mendasar yang hendak diselesaikan oleh kebijakan, sekaligus melihat kecocokan antar tujuan kebijakan dan kebutuhan ril pemuda di daerah.

Dalam penelitian di lapangan, ditemukan bahwa penyusunan kebijakan ini berangkat dari kebutuhan untuk meningkatkan kualitas dan kemandirian pemuda, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi seperti tingginya angka pengangguran pemuda dan terbatasnya akses pelatihan kewirausahaan. Informan dari Dinas Perinaker menjelaskan bahwa sebelum kebijakan ini ditetapkan, banyak program kepemudaan yang berjalan tidak terarah dan belum mampu mendorong pemuda berwirausaha secara berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah melihat potensi besar pemuda di sektor ekonomi kreatif dan UMKM, sehingga kebijakan ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum untuk mendorong pembinaan kewirausahaan secara lebih sistematis.

Berdasarkan wawancara dengan pejabat Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, diketahui bahwa Perda No. 1 Tahun 2019 diterbitkan sebagai respon atas tingginya angka pengangguran pemuda dan minimnya keterlibatan pemuda dalam dunia kewirausahaan. Banyak pemuda setelah lulus SMA/SMK cenderung mencari pekerjaan sebagai buruh industri migas atau merantau, sehingga perlu ada kebijakan yang mendorong kemandirian ekonomi pemuda melalui pelatihan dan pemberdayaan kewirausahaan. Wawancara dengan pengelola program pelatihan menunjukkan bahwa kebutuhan pelatihan kewirausahaan cukup tinggi karena pemuda banyak yang belum memiliki keterampilan teknis. Mereka menilai kebijakan ini relevan, terutama karena



peluang usaha di sektor UMKM, kuliner, pertanian modern, dan industri kreatif di Bojonegoro sangat terbuka.

Dari sisi pemuda, sebagian besar informan menilai bahwa kebijakan ini tepat karena memberikan ruang bagi pemuda untuk belajar keterampilan baru, namun mereka menilai informasi tentang program masih terbatas, sehingga banyak pemuda di desa belum mengetahui adanya pelatihan dari pemerintah. Masyarakat umum, seperti pelaku UMKM dan tokoh desa, menyatakan bahwa program ini dibutuhkan karena dapat mendorong pemuda agar tidak bergantung pada lapangan pekerjaan formal, tetapi menjadi pencipta usaha mandiri. Temuan tersebut menunjukkan bahwa secara konteks, kebijakan ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pemuda. Namun, relevansinya perlu diperkuat dengan penyebaran informasi yang lebih merata dan peningkatan kebutuhan pelatihan berbasis potensi ekonomi lokal.

Namun, temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, pemahaman masyarakat dan sebagian pemuda terhadap tujuan Perda ini masih rendah. Banyak pemuda yang mengikuti program pelatihan kewirausahaan tetapi tidak mengetahui bahwa program tersebut merupakan bagian dari implementasi Perda No. 1 Tahun 2019. Di sisi lain, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai prioritas program yang seharusnya dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek konteks kebijakan masih perlu ditinjau dalam hal sosialisasi kebutuhan pemuda dengan tujuan kebijakan.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan signifikan. Sebagian besar penelitian sebelumnya menuliskan kebijakan kepemudaan lebih menekankan pada aspek pembinaan karakter, peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi kepemudaan, atau pengembangan minat dan bakat. Hanya sedikit penelitian yang secara spesifik mengkaji kebijakan kepemudaan dalam perspektif pengembangan kewirausahaan. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada pelaksanaan program saja, sedangkan penelitian ini memberikan evaluasi dari sisi konteks, meliputi relevansi kebijakan, dan kebutuhan pemuda yang melatarbelakangi penerapannya dan berhasil atau tidaknya program dalam kebijakan ini.

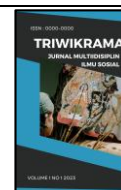
Secara keseluruhan, temuan pada komponen konteks menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat, namun masih memerlukan optimalisasi terutama pada pendataan kebutuhan pemuda dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan. Temuan ini menjadi dasar bagi evaluasi pada model CIPP untuk melihat sejauh mana input, proses, dan produk kebijakan dapat berjalan sesuai dengan konteks yang telah dianalisis.

B. Komponen Input (Masukan)

Komponen input menilai kesiapan sumber daya, perencanaan, dan sarana pendukung kebijakan. Input menjadi aspek penting karena menentukan sejauh mana kebijakan dapat dijalankan secara efektif sesuai tujuan Perda No. 1 Tahun 2019. Pada komponen ini, evaluasi difokuskan pada ketersediaan sumber daya manusia (SDM), kecukupan anggaran, kejelasan perencanaan program, serta kelayakan sarana dan prasarana pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan kepemudaan dan kewirausahaan pemuda.

Wawancara dengan pejabat Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perencanaan program pelatihan dilaksanakan melalui pendataan pemuda pencari kerja dan pemuda wirausaha pemula. Namun pengelola program mengakui bahwa pendataan belum sepenuhnya akurat karena masih banyak pemuda yang tidak tercatat dalam sistem. Kemudian, jumlah pengelola pelatihan cukup terbatas sehingga beberapa materi harus disampaikan oleh instruktur dari luar daerah.

Selain itu, fasilitas pelatihan, seperti ruang kelas, alat praktik, dan peralatan usaha, dinilai belum memadai untuk beberapa jenis pelatihan, terutama pelatihan berbasis teknologi seperti digital marketing, desain grafis, atau pengolahan produk modern. Pemuda yang diwawancarai menyebutkan bahwa beberapa pelatihan hanya bersifat teori tanpa praktik memadai. Selain itu,



anggaran yang dialokasikan untuk program kewirausahaan pemuda mengalami penurunan setiap tahunnya sehingga beberapa kegiatan harus disesuaikan dengan ketersediaan dana. Meskipun demikian, dinas tetap berupaya menjalin kerja sama dengan pihak ketiga seperti UMKM lokal, komunitas wirausaha, dan lembaga pelatihan swasta untuk memperkuat kapasitas program.

Dalam proses perencanaan ditemukan bahwa perencanaan kegiatan kewirausahaan pemuda telah tercantum dalam dokumen perencanaan seperti Renstra dan RKA, namun realisasi di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan perencanaan awal. Beberapa kegiatan pelatihan mengalami perubahan jadwal atau penyesuaian materi karena menyesuaikan kebutuhan peserta atau keterbatasan fasilitator. Selain itu, perencanaan belum sepenuhnya berbasis pada data minat dan potensi kewirausahaan pemuda di setiap kecamatan, sehingga sasaran program terkadang belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka perencanaan sudah tersedia, pemanfaatan data dan analisis kebutuhan masih perlu ditingkatkan. Sarana dan prasarana pendukung kebijakan juga menjadi perhatian penting dalam evaluasi komponen Input. Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa kegiatan kewirausahaan pemuda dilakukan menggunakan fasilitas pemerintah seperti aula kantor dinas yang sebenarnya tidak sepenuhnya dirancang untuk kegiatan pelatihan berbasis praktik. Akses terhadap peralatan usaha, ruang praktik, serta media pembelajaran masih terbatas sehingga beberapa pelatihan hanya dapat memberikan materi dasar tanpa praktik langsung. Sementara itu, masyarakat yang terdampak menyatakan bahwa dukungan modal usaha lanjutan masih minim. Banyak pemuda yang sudah mengikuti pelatihan tetapi kesulitan memulai usaha karena tidak memiliki akses permodalan.

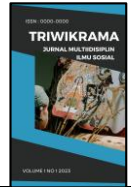
Dengan demikian, aspek input menunjukkan bahwa kebijakan ini sudah memiliki dasar perencanaan yang baik, tetapi belum didukung sepenuhnya oleh fasilitas, pendataan akurat, dan sumber daya instruktur yang memadai. Kelemahan ini berpotensi menghambat tercapainya tujuan pemberdayaan pemuda secara optimal.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan yaitu, penelitian sebelumnya umumnya berfokus pembinaan organisasi kepemudaan atau kegiatan kepeloporan, sehingga analisis pada aspek input lebih menekankan pada peran fasilitator dan pembiayaan kegiatan rutin pemuda. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menilai input pada kebijakan kewirausahaan pemuda, sehingga ruang lingkup pembahasan lebih luas meliputi kompetensi teknis fasilitator kewirausahaan, kecukupan sarana praktik, dan kebutuhan anggaran yang bersifat produktif. Selain itu, penelitian sebelumnya hanya melakukan observasi pada satu program yang fasilitas lengkap, sehingga perbandingannya tidak menunjukkan kurangnya sarana dan fasilitas di program pelatihan yang lainnya.

C. Komponen Process (Proses)

Komponen proses melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan dilakukan di lapangan. Berdasarkan ketentuan Perda No. 1 Tahun 2019. Evaluasi proses mencakup mekanisme pelaksanaan program, koordinasi antar stakeholder, tahapan kegiatan, serta efektivitas implementasi kebijakan dalam menjawab kebutuhan pemuda. Melalui analisis proses, dapat diketahui sejauh mana input yang tersedia dimanfaatkan secara optimal dan bagaimana hambatan pelaksanaan mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan.

Pada wawancara dengan pengelola pelatihan, mekanisme pelaksanaan dimulai dari pendaftaran peserta, seleksi administrasi, pelaksanaan pelatihan, hingga evaluasi akhir. Namun, proses pendaftaran masih banyak bergantung pada informasi daring dan media sosial, sehingga pemuda pedesaan yang kurang aktif di media digital sering tidak mengetahui adanya program tersebut.



Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program kewirausahaan pemuda telah dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan dasar kewirausahaan, pendampingan UMKM pemuda, seminar motivasi, serta fasilitasi lomba inovasi bisnis. Namun, proses pelaksanaan tidak selalu berjalan sesuai perencanaan awal. Beberapa kegiatan mengalami penundaan akibat keterbatasan narasumber atau minimnya peserta dari wilayah tertentu. Dalam pelatihan teknis, materi sering kali lebih menekankan teori dibanding praktik, sehingga peserta merasa belum mendapatkan pengalaman langsung yang cukup untuk memulai usaha. Selain itu, proses pendampingan pascapelatihan masih belum optimal karena belum ada sistem monitoring berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan usaha pemuda.

Proses koordinasi antar instansi, seperti Dinas Perinaker dan pemerintah desa dinilai belum optimal. Hal ini ditegaskan oleh pejabat dinas bahwa masing-masing instansi masih berjalan dengan agenda sendiri, sehingga sinkronisasi program belum terintegrasi. Pemuda peserta pelatihan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan program, beberapa pelatihan tidak tepat waktu dan materi tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, pelatihan kadang bersifat sangat dasar sehingga peserta kesulitan mengembangkan keterampilan secara mandiri setelah program selesai.

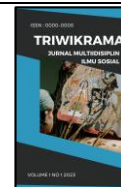
Hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa koordinasi tersebut belum terstruktur dengan baik. Misalnya, beberapa kecamatan merasa belum dilibatkan secara maksimal dalam proses pendataan pemuda atau penentuan lokasi pelatihan. Hal ini menyebabkan distribusi peserta antarwilayah kurang merata dan ada potensi pemuda yang tidak terjangkau program. Sehingga dukungan lanjutan untuk pemuda wirausaha belum berjalan optimal.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, perbedaan utama terletak pada fokus dan karakteristik pelaksanaannya. Sebagian besar penelitian sebelumnya membahas pelaksanaan program kepemudaan dari sisi pengembangan karakter, kepeloporan, atau pemberdayaan organisasi kepemudaan. Dalam konteks tersebut, proses pelaksanaan lebih sederhana karena kegiatan yang dilakukan bersifat ekstrakurikuler atau kepelatihan umum. Berbeda dengan itu, penelitian ini menyoroti pelaksanaan program kewirausahaan pemuda, yang memiliki proses lebih kompleks karena membutuhkan pendampingan, peralatan praktik, keterlibatan mitra eksternal, serta koordinasi antar desa atau kecamatan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan gambaran lebih rinci mengenai tantangan implementasi yang bersifat teknis maupun koordinatif dalam program kewirausahaan.

Secara keseluruhan, evaluasi pada komponen Process menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah diimplementasikan melalui berbagai kegiatan kepemudaan, masih terdapat kendala dalam hal konsistensi pelaksanaan, koordinasi antar kecamatan, serta keberlanjutan program. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperlihatkan bagaimana pelaksanaan kebijakan kewirausahaan pemuda membutuhkan mekanisme yang lebih terstruktur agar mampu menghasilkan dampak yang signifikan. Temuan ini menjadi dasar penting untuk melihat konsistensi hasil pada komponen Product pada bagian selanjutnya.

D. Komponen Product (Produk)

Komponen product dalam model evaluasi CIPP bertujuan untuk menilai hasil atau keluaran dari implementasi kebijakan penyelenggaraan kepemudaan dalam rangka pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Bojonegoro. Evaluasi pada komponen ini menekankan pada pencapaian tujuan kebijakan, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang, serta mengukur sejauh mana program-program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi pemuda, seperti peningkatan pengetahuan kewirausahaan, jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan, hingga terbentuknya usaha baru yang dikelola oleh pemuda.



Berdasarkan wawancara dengan informan dari Dinas Perinaker belum terdapat sistem evaluasi hasil yang terstruktur untuk menilai perkembangan peserta pascapelatihan. Pemantauan dilakukan secara informal dan tidak mencakup keseluruhan peserta, sehingga sulit diukur berapa persen pemuda yang benar-benar mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan. Dari sisi dampak, kebijakan ini memang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas pemuda, namun belum menunjukkan dampak besar terhadap penurunan angka pengangguran pemuda atau peningkatan jumlah UMKM pemuda secara signifikan.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah menghasilkan beberapa capaian positif, seperti adanya peningkatan jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam pelatihan kewirausahaan setiap tahunnya. Para peserta mengaku memperoleh pengetahuan dasar mengenai manajemen usaha, pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan sederhana. Beberapa pemuda yang mengikuti program pendampingan juga telah berhasil memulai usaha kecil seperti bisnis makanan, kerajinan, dan produk kreatif. Namun, jumlah usaha baru yang benar-benar berkelanjutan masih terbatas. Banyak peserta yang mengaku kesulitan mempertahankan usaha karena kurangnya modal lanjutan, pendampingan jangka panjang, dan keterbatasan akses pasar.

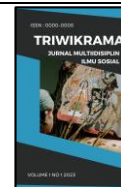
Masyarakat menilai bahwa dampak ekonomi program masih terbatas pada sebagian kecil pemuda yang benar-benar memiliki motivasi tinggi. Meskipun demikian, program ini tetap memberikan manfaat positif, terutama meningkatkan kepercayaan diri pemuda untuk memulai usaha dan meningkatkan keterampilan kerja.

Secara keseluruhan, produk kebijakan menunjukkan bahwa program telah memberikan hasil, tetapi dampak jangka panjang masih terbatas. Untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar, diperlukan dukungan lanjutan berupa akses modal, pendampingan, dan penyesuaian pelatihan dengan kebutuhan ekonomi daerah.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menunjukkan perbedaan dalam hal fokus capaian kebijakan. Penelitian sebelumnya banyak menyoroti hasil kegiatan kepemudaan pada aspek pembinaan karakter, penguatan organisasi, atau peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial. Oleh karena itu, hasil yang dianalisis bersifat seperti peningkatan motivasi atau penguatan jaringan antar-organisasi pemuda. Berbeda dengan penelitian ini, peneliti mengkaji hasil kebijakan pada aspek kewirausahaan, sehingga capaian yang dinilai bersifat lebih konkret misalnya jumlah usaha baru, tingkat keberlanjutan usaha, dan peningkatan kompetensi kewirausahaan. Perbedaan ini membuat penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih operasional terhadap evaluasi kebijakan pemuda.

Selain itu, penelitian di daerah lain menunjukkan bahwa hasil kebijakan kewirausahaan pemuda lebih optimal di daerah yang memiliki dukungan sarana memadai. Sementara itu, Kabupaten Bojonegoro masih menghadapi keterbatasan tersebut, sehingga hasil kebijakannya belum mampu mencapai dampak yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa setiap daerah memerlukan pendekatan yang berbeda untuk memaksimalkan hasil program kewirausahaan pemuda.

Secara keseluruhan, komponen Product menunjukkan bahwa kebijakan penyelenggaraan kepemudaan dalam pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Bojonegoro telah menghasilkan beberapa capaian positif, terutama terkait peningkatan kompetensi dan motivasi pemuda. Namun, hasil yang dicapai masih bersifat jangka pendek dan belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pemuda. Perbandingan dengan penelitian terdahulu menegaskan bahwa penelitian ini memberikan dimensi baru dalam evaluasi hasil kebijakan kepemudaan, yaitu dengan menilai seberapa jauh kebijakan mampu menghasilkan dampak nyata pada dunia kewirausahaan pemuda.



4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) dapat disimpulkan bahwa :

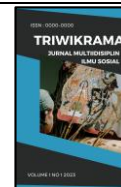
1. Aspek Context, kebijakan penyelenggaraan kepemudaan dalam rangka pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Bojonegoro memiliki dasar hukum yang kuat melalui Perda No. 1 Tahun 2019 dan relevan dengan kebutuhan pemuda, terutama dalam menjawab tantangan pengangguran dan potensi ekonomi kreatif lokal. Namun, pemahaman pemuda terhadap substansi kebijakan masih rendah, sehingga tujuan kebijakan belum sepenuhnya dipahami oleh penerima manfaat.
2. Aspek Input, pemerintah daerah telah menyediakan sumber daya manusia, perencanaan, dan sebagian sarana pendukung pelaksanaan program. Meski demikian, jumlah SDM khusus dan sarana praktik kewirausahaan masih terbatas, sementara perencanaan program belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil pemuda di berbagai kecamatan. Ketersediaan anggaran juga fluktuatif sehingga beberapa kegiatan harus disesuaikan dengan kondisi pendanaan.
3. Aspek Process, pelaksanaan program telah berjalan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti pelatihan, pendampingan, dan seminar kewirausahaan. Namun, pelaksanaan belum konsisten karena keterbatasan narasumber, koordinasi lintas lembaga yang belum terstruktur, serta pemerataan peserta yang belum optimal. Monitoring pascaprogram juga belum berjalan maksimal sehingga keberlanjutan pendampingan masih lemah.
4. Aspek Product, kebijakan telah menghasilkan peningkatan pengetahuan kewirausahaan pemuda dan memunculkan beberapa usaha baru, namun keberlanjutan usaha tersebut masih rendah. Dampak jangka panjang terhadap pengurangan pengangguran pemuda maupun peningkatan UMKM pemuda belum terlihat signifikan. Secara keseluruhan, kebijakan telah memberikan output positif, namun belum mencapai outcome yang optimal karena keterbatasan input dan proses pelaksanaan yang masih perlu diperbaiki.

Saran

Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi kebijakan dan penyebaran informasi agar pemuda memahami substansi Perda No. 1 Tahun 2019 dan mengetahui peluang yang dapat mereka akses dalam program kewirausahaan. Pemanfaatan media digital, kerja sama dengan sekolah, organisasi pemuda, dan pemerintah kecamatan dapat menjadi strategi efektif dalam memperluas jangkauan sosialisasi.

Kemudian perlu dilakukan penguatan input melalui penambahan SDM kompeten, peningkatan sarana praktik, serta penyusunan perencanaan berbasis data kebutuhan pemuda. Pemerintah daerah dapat menjalin kemitraan lebih luas dengan sektor swasta, lembaga bisnis, perguruan tinggi, dan komunitas wirausaha untuk memperkaya materi pelatihan dan menyediakan akses fasilitas pendukung kewirausahaan. Alokasi anggaran juga perlu lebih stabil dan direncanakan secara berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efektivitas proses, diperlukan koordinasi lintas lembaga yang lebih terstruktur dan pembentukan sistem monitoring serta pendampingan berkelanjutan. Program pascapelatihan harus dibuat sistematis sehingga perkembangan peserta dapat dipantau dan diberi

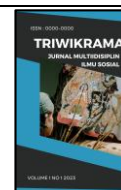


dukungan lanjutan seperti akses modal, konsultasi usaha, atau pemasaran digital. Hal ini akan memperkuat dampak kebijakan secara jangka panjang.

Kemudian yang terakhir pada aspek hasil, pemerintah dapat mengembangkan pusat kewirausahaan pemuda sebagai wadah pelatihan dan kolaborasi antar pemuda. Selain itu, perlunya evaluasi rutin agar kebijakan dapat terus diperbaiki sesuai kebutuhan pemuda. Dengan hal tersebut, kebijakan penyelenggaraan kepemudaan diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap munculnya lebih banyak wirausaha muda yang berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyani, R., Zailani, A., Nurdiansyah, F., Azuma, M. I., & Tunas, U. (2025). PEMBERDAYAAN GENERASI MUDA MELALUI PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI BISNIS. In PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Vol. 6, Issue 2).
- Ahmad Sholikin. (2024). Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Potensi Lokal di Kabupaten Bojonegoro. *Journal of Society Bridge*, 2(3), 175-185. <https://doi.org/10.59012/jsb.v2i3.54>
- Anggapratama, R., Munawaroh, S. R., Rahayu, M. R., & Bojonegoro, U. (2024). Peningkatan Potensi Sektor Ekonomi Melalui Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Desa Betet Melalui KKN-T`K Universitas Bojonegoro. In *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* (Vol. 4, Issue 3).
- Arifin Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, J., Sosial Gd Cawang Kencana Lt, K. R., Mayjen Sutoyo, J., & Timur, J. (2020). BUDAYA KEMISKINAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA CULTURE OF POVERTY IN POVERTY REDUCTION IN INDONESIA (Vol. 6, Issue 02). *Kesejahteraan Sosial*.
- Basia Prodi Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana, L., Suprihanto, J., & Armawi, A. (2016). STRATEGI PENGEMBANGAN WIRAUSAHA PEMUDA DALAM MEWUJUDKAN WIRAUSAHAWAN MANDIRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA (Studi pada Koperasi Sumekar di Kampung Sanggrahan Pathuk Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta). In *Jurnal Ketahanan Nasional* (Vol. 22, Issue 1).
- Cahyanti, E. N. (2015). PERAN KARANG TARUNA DALAM MENGURANGI PENGANGGURAN PEMUDA DI DESA PLESUNGAN KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO Listyaningsih (Vol. 02). <http://kataronline.wordpress.com>
- Diandra, D. (n.d.). Program Pengembangan Kewirausahaan Untuk Menciptakan Pelaku Usaha Sosial Yang Kompetitif.
- Diyah, S. ', & Adawiyah, E. (2020). KHIDMAT SOSIAL. In *Journal of Social Work and Social Service* (Vol. 1, Issue 1).
- Hardana IAIN Padangsidempuan Jalan Rizal Nurdin Km, A. T. (2018). PERGURUAN TINGGI. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 6.
- Huberman, A. M. ., & Miles, M. B. . (2002). *The qualitative researcher's companion*. Sage Publications.



Ilmu Ekonomi FE-UII Pengembangan Wirausaha Muda Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta, P. (2015). □ Lak Lak Nazhat El Hasanah (Vol. 4, Issue 2). www.detik.com

kewirausahaan. (n.d.).

Kurniawan, T. (n.d.). “Analyzing the Politics of Law in Indonesian Environmental Policies by using van Meter and van Horn Model.” http://www.abc.net.au/4corners/content/2002/timber_mafia/resources/resources_facts.htm,

Larantika, A. A. A. D., Zauhar, S., Makmur, Moc., & Setyowati, E. (2017). Collaboration as a Strategy for Poverty Alleviation. *International Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)*, 1(3), 40. <https://doi.org/10.21744/ijssh.v1i3.51>

Noor Andriana, A., & Fourqoniah, F. (2020). JURNAL PLAKAT Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat PENGEMBANGAN JIWA ENTREPRENEUR DALAM MENINGKATKAN JUMLAH WIRAUSAHA MUDA. 2(1).

Pusat, S., Dan, P., Ketenagakerjaan, P., Ketenagakerjaan, K., Jenderal, J., Subroto, G., 51, K., & Selatan, J. (2019). KEWIRAUSAHAAN DAN PEMBERDAYAAN PEMUDA DALAM MENGURANGI PENGANGGURAN. In *Jurnal Ketenagakerjaan* (Vol. 14, Issue 1).

Puspitasari, D. C., Muda, W., Desa, M., Partisipasi, D., Desa, P., Dewi, □, & Puspitasari, C. (2015). Wirausaha Muda Membangun Desa: Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa (Vol. 4, Issue 2).

Ratnaya, G., Indriaswuri, R., Widayanthi, D. G. C., Atmaja, I. M. P. D., & Dalem, A. A. G. P. K. P. (2022). CIPP Evaluation Model for Vocational Education: A Critical Review. *Education Quarterly Reviews*, 5(3). <https://doi.org/10.31014/aior.1993.05.03.519>

Satiti, S. (2019). Gerakan Ayo Sekolah di... | Sonyaruri Satiti GERAKAN AYO SEKOLAH DI KABUPATEN BOJONEGORO: PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN UNTUK MENYONGSONG BONUS DEMOGRAFI (THE “AYO SEKOLAH” MOVEMENT IN BOJONEGORO REGENCY: IMPROVING HUMAN RESOURCES THROUGH EDUCATION TO SUPPORT DEMOGRAPHIC BONUS). In *Jurnal Kependudukan Indonesia* | (Vol. 14, Issue Juni).

Stufflebeam, D. L. (2007). CIPP EVALUATION MODEL CHECKLIST [Second Edition] A tool for applying the CIPP Model to assess long-term enterprises Intended for use by evaluators and evaluation clients/stakeholders. www.wmich.edu/evalctr/checklists

TheJournalish: Social and Government. (n.d.). <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index>

Tingkat Pendidikan, P., Dan Pengangguran, K., & Handayani, A. (2002). *J u n a l E K B I S / V o l . X I X / N o . 1 E d i s i M a r e t 2 0 1 8* | 1024.

URGENSI PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN UNTUK MENANGGULANGI PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA.